

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir)**

ARTIKEL ILMIAH



OLEH:

SURYA ADHITAMA

1207135/2012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Kasus Pada Kabupaten Ogan Ilir)

Oleh :

Surva Adhitama
1207135/2012

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
September 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 11 Agustus 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19771123 200312 1 003


Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP: 19801019 200604 2 002

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir)

Surya Adhitama
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : uyaadhitama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebanyak 24 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci :Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Kompetensi SDM, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to see the effect of the application of government accounting standards, regional financial accounting system, and competence of human resources on the quality of local government financial statements. Population in this research is all SKPD that exist in Regency of Ogan Ilir that is counted 24 SKPD. The sample in this research used is total sampling technique. The analysis was done by using multiple regression model. The results of this study indicated that the application of local government accounting standards, regional financial accounting system and human resource competence have significant positive effects on the quality of financial statement.

Keyword : Application of Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting System, Competence of human resource, and Quality of Local Government Financial Report

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis, dan amanah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-*download* dari internet, ternyata masih banyak ditemukan pemerintah daerah yang belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Seperti tulisan yang berhasil dihimpun berikut ini:

(<http://palembang.bpk.go.id/?p=13648>)

Menurut Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, pembangunan, sistem pengawasan, dan pemeriksaan, serta sebagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang memberikan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Salah satu ruang lingkup tersebut adalah Sistem

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKD).

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No.59 Tahun 2007). Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumentasi sampai dengan laporan dihasilkan (Bastian, 2010).

Menurut Celviana (2010) keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan menurut Safriada (2010) laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peranan internal audit. Sedangkan menurut Desi (2007) keterandalan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008) yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kota Palembang dan Ogan ilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi

(2015) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan sejalan dengan penelitian Liza (2014) menyatakan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir saat ini yaitu penurunan Opini Audit dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2014 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ditahun 2015. Berikut pernyataan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan (<http://www.bpkp.go.id/sumsel/berita/read/16158/0/OPINI-BPK-T.A-2015-DUA-KABUPATEN-DI-SUMSEL-TURUN-PREDIKAT.bpkp>)

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Kabupaten Ogan Ilir karena adanya penurunan opini audit dari WTP ke WDP. Dimana penulis fokus untuk meneliti

penurunan tersebut dari segi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah), dan KSDM (Kompetensi Sumber Daya Manusia).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Sejauhmana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
3. Sejauhmana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang sejauhmana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
3. Bagi Akademis
Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya maupun referensi lain bagi pihak yang memerlukan.

II. KAJIAN TEORI

1. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan Bastian (2006) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu

pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintahan pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegunaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kegunaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan

oleh para ahli sebagai berikut: menurut Erlina Rasdianto (2013) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara menurut Abdul Halim (2007:43) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sedangkan Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belajardaerah

(APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan komputer.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting yang harus dilihat dalam instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, professional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktifitas kerja dilingkungan organisasi. Manusia merupakan unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dari mengembangkan misinya.

Manusia merupakan aktor utama saat organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakteristik kemampuannya, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik kemudian membentuk perilaku pegawai. Kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang

dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik (Mahmudi, 2007).

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan (2010) menguji pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Junita (2008) tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, menyatakan Pemahaman Standar Akuntansi

Pemerintahan Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Liza (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan dan Penelitian oleh Dewi (2015) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2008) yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kota Palembang dan Ogan ilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dan Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) juga mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah, dengan jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku secara umum yaitu PP No. 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu, Agustiawan (2010) menguji pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dan Penelitian yang dilakukan oleh Junita (2008) tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, menyatakan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mardiasmo (2004:35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Liza (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan dan Penelitian oleh Dewi (2015) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

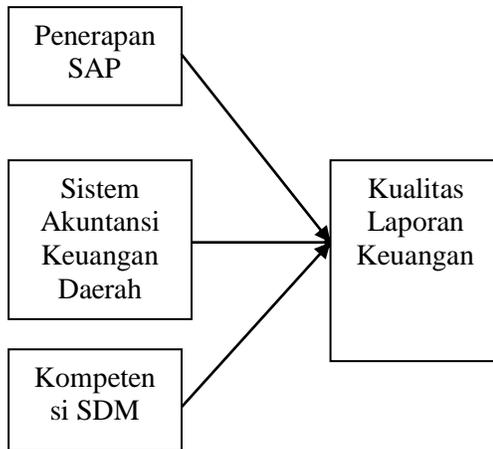
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Azhar, 2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi..

Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Mempelajari kompetensi sumber daya manusia adalah upaya mempelajari peran SDM dalam organisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memilih antara kompetensi potensial dan pengembangan potensi karyawan

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2008) menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan ilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dan berbeda Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) juga mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah, dengan jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₂ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif (*causatif*). Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian yang berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel

lainnya (Sugiyono, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Penerapan SAP (X₁), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂), Kompetensi SDM (X₃), sebagai variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai variabel dependen.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 24 SKPD.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan staf akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber data yang asli (tidak melalui media perantara).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Kuncoro (2003) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan

2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel variabel independen adalah:

- a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)
- b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)
- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3)

F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu:

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner mencakup: Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

H. Model dan Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Uji validitas berguna untuk menentukan seberapa cermat suatu alat melakukan fungsi ukurannya.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas penulis akan melakukan uji reliabilitas yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha's* (α) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 17.0. Sekaran (2006) menyatakan cara mengukur reliabilitas

dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0.6 tidak reliable
- b. 0.6-0.7 dapat diterima
- c. 0.7-0.8 baik
- d. Lebih dari 0.8 reliabel

I. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians

dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homogenitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* menyusul untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%. Apabila signifikansi lebih dari 5% berarti tidak mengandung heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas tersebut, maka salah satu diantaranya dieliminir (dikeluarkan) dari model berganda atau menambah variabel bebasnya. Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria:

- 1) Jika angka *tolerance* diatas 0,1 dan $\text{VIF} < 10$ dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.
- 2) Jika angka *tolerance* dibawah 0,1 dan $\text{VIF} > 10$ dikatakan terdapat gejala multikolinearitas.

J. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut.

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban di-hitung dengan langkah-langkah berikut:

- a) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden setiap item pertanyaan yang diajukan.
- b) Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

$$R_s = \frac{(5 SS) + (4 S) + (3 KS) + (2 TS) + (1 STS)}{\text{jumlah responden}}$$

Dimana:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

- c) Menghitung nilai rerata skor total item
- d) Menghitung nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) dengan rumus:

$$TCR = \frac{\text{Rata - Rata Skor}}{5}$$

Dimana:

- TCR : Tingkat capaian responden
- R_s : Rata-rata skor jawaban
- N : Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- 1. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik
- 2. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik.
- 3. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- α = Konstanta
- X₁ = Penerapan SAP
- X₂ = Sistem Akuntans Keuangan

Daerah
 X_3 = Kompetensi SDM
 e = error

b. Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dari variabel bebas terhadap variabel terikat dari *adjusted R square* nya. Pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan mjumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (r^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

c. Uji (F – test)

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, ke-mudian dibandingkan dengan F_{tabel} . Untuk menentukan nilai F_{tabel} , tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n - k)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah va-riabel termasuk intersep. Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara ber-sama-sama. Sebaliknya jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

d. Uji t (Hipotesis)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

meng-asumsikan variabel lain adalah konstan.

Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

1. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika $\text{sig} > \alpha$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

K. Defenisis Operasional

1. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

SAKD merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan teknik *total sampling* untuk pengambilan sampel, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 24 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari dinas, dan badan. Masing-masing SKPD terdiri dari 4 responden. Dari 24 SKPD tersebut, disebarkan sebanyak 96 kuesioner.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dari hasil pengolahan data SPSS didapat bahwa nilai seluruh variabel dari kolmogrov *smirnov* sebesar 0,687 dengan signifikan 0,733. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *variance inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dengan nilai VIF 1.002, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan nilai VIF 1.000. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) dengan nilai VIF 1.002. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,998. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan nilai *tolerance* 1,000. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) dengan nilai *tolerance* 0,998. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama yang lainnya, atau variabel *independen* pada penelitian bebas multikol.

3. Uji Heterokedastisitas

Tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi atau semua variabel memiliki $\text{sig} > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari heterokedastisitas.

C. Uji Model

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai F_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 3,10. Nilai F_{hitung} adalah 11,012 sedangkan nilai sig adalah $0,000^a$. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$ yaitu $11,012 > 3,10$ dan $sig 0,000^a < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Regresi Berganda

Analisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 14,012 + 0,283 (X_1) - 0,014 (X_2) + 0,182 (X_3) + e$$

Dimana:

X_1 = Penerapan SAP

X_2 = SAKD

X_3 = Kompetensi SDM

Y = Kualitas Laporan Keuangan

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 11,896 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi

Pemerintahan, Sisteam akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM adalah nol maka nilai kualitas laporan keuangan adalah sebesar konstansta (11,896).

- Koefisien Penerpan SAP 0,180 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Penerpan SAP satu satuan akan mengakibatkan peningkatankualitas laporan keuangan pemerintah daerah 0,180 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,180.
- Koefisien Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,182 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,182 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif 0,182.
- Koefisien Kompetensi sumber daya manusia 0,489 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,489 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif 0,489.

3. Uji Koefisien Determinasi

nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,252 Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah dan

kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 25,2%, sedangkan 74,8% ditentukan oleh variabel lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

D. Uji Hipotesis (*t test*)

Uji *t* statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k = 90-2 = 88$ adalah 1,662.

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai *t* hitung dan *t* tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai *t* tabel pada α (0,05) adalah 1,662. Pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) nilai *t* hitung adalah 2,716 dan nilai *sig* adalah 0,008. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,716 > 1,662$ atau nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 0,180. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai *t* hitung dan *t* tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai *t* tabel pada α (0,05) adalah 1,662. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X2) nilai *t* hitung adalah 2,573 dan nilai *sig* adalah 0,012. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,573 > 1,662$ atau nilai signifikansi $0,012 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 0,182. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 1,662. Pada variabel Kompetensi sumber daya manusia (X3) nilai t_{hitung} adalah 4,478 dan nilai *sig* adalah 0,000. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,478 > 1,662$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X3 bernilai positif yaitu 0,489. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H3 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kompetensi sumber daya manusia (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

E. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah penting disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena laporan keuangan mampu memberikan informasi yang relevan, andal dan dapat dibandingkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menjalankan tugasnya (PP No. 24/2005).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Agustawan (2010) menguji pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Junita (2008) tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, menyatakan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata penerapan standar akuntansi pemerintahan dikategorikan baik dengan nilai 83,35%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 4 yaitu Penerapan basis Kas untuk pengakuan Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat capaian responden 78,8%. Logikanya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini dapat dilihat dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berarti kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu (Standar Akuntansi Pemerintahan), mempunyai wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan. Aparatur pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, khususnya pegawai pengelola keuangan memiliki

wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer Deddi Nordiawan (2010) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya, apabila penerapan SAKD tidak sesuai dengan aturannya maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak bagus

Hasil Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Liza (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan dan Penelitian oleh Dewi (2015) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata sistem akuntansi keuangan daerah dikategorikan cukup baik dengan nilai 67,13% Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 8 yaitu Dinas ini melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan dengan tingkat capaian responden 64,67%. Hal ini menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah belum sepenuhnya terlaksana. Logikanya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Jadi setiap SKPD harus dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah agar kualitas laporan keuangan berkualitas dan tepat waktu.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan menjelaskan sejauhmana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013)

mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah, dengan jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata kompetensi sumber daya manusia dikategorikan baik dengan nilai 85,68%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 5 yaitu Materi pelatihan yang diberikan mudah dipahami oleh pegawai, dengan tingkat capaian responden 80%, Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan belum banyak di mengerti oleh pegawai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD), maka pemerintah harus bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Hanya ada tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga belum meneliti semua variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Peneliti hanya melakukan penelitian pada Kabupaten Ogan Ilir sehingga untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

C. Saran

Adapun saran yang mungkin berguna untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem akuntansi keuangan daerah karena terlihat

dari hasil ter rata-rata hanya 60% di setiap indikator.

2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah baik dilakukan. Agar nilai yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai standar akuntansi pemerintahan karena pada indikator menunjukkan bahwa SKPD belum banyak yang menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan karena memperoleh tingkat capaian responden terendah.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia juga telah baik dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai Kompetensi sumber daya manusia karena pada indikator Materi pelatihan yang diberikan mudah dipahami oleh pegawai karena memperoleh tingkat capaian responden terendah.
4. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya sistem pengendalian intern, pemahaman akuntansi, peran internal audit, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dll. Penelitian ini masih

memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survey lapangan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah N. N, (2009). *“Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi keuangan pemerintah Daerah”*. Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Penerbit Prenada Media Group Jakarta
- Agustriawan, Vicky. (2010). *“Pengaruh Pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten” Gorontalo Utara*. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Desi, 2008, *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Simposium Nasional Akuntansi, XII, Pontianak

- Dessler, Gary. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Prentice Hall
- Devi, 2011 “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*” Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Dewi. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lawang Sumatra Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
- Fajar, adrianus. 2011. *Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung*. Skripsi UPI Bandung
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hilda, Erfina. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang
- <http://palembang.bpk.go.id/?p=13648> Pidato anggota BPK RI wakil Sumatera Selatan untuk melaksanakan SAP berbasis akrual, 2015.
- http://www.bpkp.go.id/sumsel/berita/read/16158/0/OPINI-BPK-T.A-2015_DUA-KABUPATEN-DI-SUMSEL-TURUN-PREDIKAT.bpkp Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahu Anggaran 2015.
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*.
- Indriasari, 2008. “*Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir*”. Jurnal Akuntansi.
- Putrid, junita. 2009. “*Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar*”, Skripsi, Jurusan Akuntansi,

- Universitas Sumatera Utara,
Medan.
- Kuncoro, Mudjarat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Liza, 2014. “*Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*”. JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014
- Novita Sari, Lusi. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Nordiwan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Rivai, Veithzal. 2005. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Safrida, 2010. ”*Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaat Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi
- Sedarmayanti, (2004). *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja Lembaga*. Penerbit: FEUI, Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. Yogyakarta: BPFE
- Wursanto. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi
- Zulhandri Chalid. (2009). “*Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi. Skripsi*. Universitas Negeri Padang” *Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Padang*

Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan
Negara

UU No.17 Tahun 2003
tentangKeuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005, karakteristik
kualitatif laporan keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2004

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010

Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan yang
bertujuan untuk memberikan
informasi

Peraturan Pemrintah No 8 tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah

Peraturan Pemrintah nomor 105 tahun
2000 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Permendagri No.13 Tahun 2006 dan
Permendagri No.59 Tahun 2007
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah.